

**BANYUMAS MENERIMA PENGHARGAAN SWASTI SABA PADAPA
KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023**



Kabupaten Banyumas menerima penghargaan Swasti Saba Padapa dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilannya dalam menyeleggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri RI nomor : HK. 01.07/ Menkes/2087/2023. Penghargaan diterima oleh PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro bersama dengan Ketua Forum Kota Sehat Ibu Erna Husen, Kepala Dinas Kesehatan dr.Widyana Grehastuti, SpOG, Msi.Med dan Tim KKS Kabupaten Banyumas.



Pengembangan Kota/Kabupaten Sehat adalah bagian dari dinamika dan semangat warga, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif di daerah, Pemerintah Pusat berperan membina dan memfasilitasi potensial yang ada. Pencapaian Kota/Kabupaten Sehat merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya, mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi masyarakat dengan cara memberdayakan mereka agar cepat saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal suatu Kota/Desa.



Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa Charter, dimana ditekankan kesehatan untuk semua yang dapat dicapai dan langgeng, jika semua aspek, sosial, ekonominya, lingkungan dan budaya diperhatikan. Oleh karena itu konsep kota sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan yang lebih ditekankan kepada suatu pendekatan kondisi sehat dan problem sakit saja, tetapi kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Perkembangan Gerakan Kota Sehat di setiap negara berbeda satu sama lain, tergantung permasalahan yang dihadapi dan tidak dapat diperbandingkan.

Kesamaan konsep Kota Sehat di seluruh negara adalah satu sama lain berasal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Disamping itu lebih mengutamakan pendekatan proses dari pada target, tidak mempunyai batas waktu, dan berkembang secara dinamik, sesuai dengan sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap. Pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Salah satu kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah pengembangan wilayah sehat. Sehingga dikembangkan Pedoman penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia yang dimaksudkan dapat menjadi

acuan bagi para pelaku pembangunan, terutama dalam memfasilitasi Forum Kabupaten/Kota Sehat Berta di dalam melakukan advokasi dan sosialisasi baik Kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat.

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.

Tujuan KKS adalah tercapainya kondisi Kabupaten/Kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Dengan sasarannya:

1. Terlaksananya Program Kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat
2. Terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.
3. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten/ Kota tersebut secara mandiri.
4. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Kabupaten Banyumas awal mengikuti Verifikasi Penilaian Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat pada tahun 2005 dengan mendapat swastisaba Kategori PADAPA, Tahun 2007 mendapat Swastisaba Kategori WIWERDA; Tahun 2021 Tidak dilakukan Verifikasi Lanjutan karena belum Deklarasi ODF Kabupaten. Tahun 2023 mengikuti penilaian dengan Target Wiwerda dengan memenuhi persyaratan sbb:

1. 100% Desa / Kelurahan ODF;
2. Memenuhi Capaian Indikator setiap Tatanan 81% s.d 90%;
3. Data Kelembagaan (SK, Rencana Kerja 2021, 2022, 2023, Lokasi Skretariat, Kegiatan).

Kabupaten Banyumas masuk nominasi Nasional untuk diverifikasi lanjutan dari Tim Pusat dengan Kategori Penghargaan **PADAPA** pada tanggal 25 Juli 2023 melalui Zoom Meeting di Smart Room Setda Kab. Banyumas. Hasil Verifikasi pusat Capaian 9 (Sembilan) Tatanan Penilaian Penyelenggaraan KKS s.d 12 Juli 2023, sbb :

- 1) Tatanan Kehidupan masyarakat Sehat Mandiri 87.71%
 - a) Angka Kematian Ibu (AKI) 180.5/100.000 Kelahiran Hidup.
 - b) Prevalensi Stunting 21.6% → Turun 16.5%
 - c) Semua ODGJ Berat mendapatkan sesuai Standar 100%;
- 2) Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum 92.31%
 - a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 63.81%;
 - b) Indeks Air Minum Aman 76.99%;
 - c) Rumah Tangga Memiliki Akses air limbah domestic Aman 90%;
 - d) Pengolahan Sampah 99.31% dengan inovasi "SUMPAH BERUANG";
 - e) Luas Kawasan Permukiman Kumuh 85.87Ha;
 - f) Rumah Ibadat menerapkan KTR 100%.
- 3) Tatanan Satuan Pendidikan 81.82%
 - a) Untuk mendukung pelaksanaan UKS Sekolah/Madrasah Kab. Banyumas memiliki kebijakan SK Bupati Banyumas Nomor 441.5/151/Tahun 2019
- 4) Tatanan Pasar 85.42%
 - a) Revitalisasi Pasar menuji pasar sehat yaitu Pasar Wage, Banyumas dan Wangon;
- 5) Tatanan Pariwisata 92.31%

- a) Peningkatan Destinasi wisata Sehat melalui Sertifikat *CHSE (Cleanliness, Health, Safety Environment)*;
 - b) Destinasi Wisata Ramah Difabel;
 - c) 5 Unit Bus Pariwisata Gratis.
- 6) Tatanan Transportasi 93.75%
- a) Kebijakan yang diterapkan untuk mengatur tatanan transportasi dan tertib lalu lintas SK Bupati No 550/859 tahun 2020 tentang Jaringan Trayek Angkutan Massal Perkotaan di Kabupaten Banyumas;
 - b) Tersedia Jalur Sepeda, Trotoar untuk disabilitas, Zona selamat sekolah, Layanan Cepat Laka Lantas PSC119, Layanan ATCS.
- 7) Tatanan Perkantoran dan Perindustrian 82.14%
- a) Kabupaten Banyumas sudah memiliki **Mal Pelayanan Publik (MPP)** untuk **mempercepat dan mempermudah pelayanan** kepada masyarakat.
 - b) Penerapan KTR 100%, Industri Kecil dan Menengah menerapkan 4R, Penerapan K3 dan Ramah Disabilitas;
- 8) Tatanan Perlindungan Sosial 73.53%
- a) Cakupan JKN PBI 100% , Aneka Kemiskinan dan Kemiskinan ekstrim menurun;
- 9) Tatanan Penanganan Bencana 92.68%
- a) Dasar Hukum penanggulangan Bencana Kab Banyumas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas;
 - b) Banyumas memiliki Sistem Informasi Data Bencana (Sidamas);
 - c) Persentase respon alert kurang dari 24 jam untuk setiap laporan/deteksi dini/status darurat bencana di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebesar 100%;
 - d) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

